



Komunikasi Kebijakan dan Perubahan Perilaku Masyarakat Pesisir: Studi Kasus di Lombok Barat

Dedy Harnanto^{a,1,*}, Kadri^{a,2}, Moh. Fakhri^{a,3}

^aUniversitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

¹dedyharnanto07@gmail.com

²kadri@uinmataram.ac.id

³moh.fakhri66@gmail.com

*Penulis Korespondensi

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Diterima: 19 Mei 2023

Direvisi: 12 Juni 2023

Diterima: 23 Juni 2023

Kata Kunci:

Komunikasi;
Kebijakan;
Perubahan Perilaku;
Masyarakat Pesisir.

Keywords:

Communication;
Policy;
Behavioral Change;
Coastal Communities.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara komunikasi kebijakan pemerintah dan perubahan perilaku masyarakat pesisir di Lombok Barat. Dalam konteks pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan, pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kebijakan disampaikan dan diterima oleh masyarakat sangat penting. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang melibatkan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi kebijakan bergantung pada kejelasan pesan, keterlibatan masyarakat, dan kesesuaian kebijakan dengan norma serta kearifan lokal. Masyarakat yang terlibat dalam proses sosialisasi dan mendapatkan informasi yang jelas cenderung menunjukkan respon positif dan beradaptasi dengan kebijakan yang diterapkan. Sebaliknya, kurangnya pemahaman dan resistensi terhadap kebijakan dapat muncul ketika masyarakat merasa kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan kepentingan mereka. Tulisan ini merekomendasikan perlunya pendekatan komunikasi yang lebih inklusif, dengan melibatkan tokoh masyarakat dan memperhatikan konteks lokal dalam penyampaian pesan kebijakan.

Abstract:

This study aims to analyze the relationship between government policy communication and behavioral changes among coastal communities in West Lombok. Within the context of sustainable coastal resource management, a comprehensive understanding of how policies are conveyed and received by the community is crucial. The research employs a qualitative method with a case study approach, involving in-depth interviews, observations, and policy document analysis. The findings indicate that the effectiveness of policy communication depends on message clarity, community engagement, and the alignment of policies with local norms and wisdom. Communities involved in the dissemination process and provided with clear information tend to respond positively and adapt to implemented policies. Conversely, a lack of understanding and resistance to policies may arise when communities feel that such policies do not consider their interests. This paper recommends the adoption of a more inclusive communication approach, involving community leaders and taking into account local contexts in policy message delivery.



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.

Pendahuluan

Komunikasi kebijakan memainkan peran penting dalam proses penyebaran informasi dan pemahaman kebijakan publik kepada masyarakat. Melalui komunikasi yang efektif, pemerintah dapat menyampaikan tujuan, manfaat, serta dampak kebijakan kepada masyarakat, sehingga diharapkan terjadi perubahan perilaku yang sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan (Lusnita, 2019). Hal ini terutama penting di daerah pesisir, seperti Lombok Barat, di mana masyarakatnya bergantung pada sumber daya alam laut untuk kelangsungan hidup mereka. Dengan adanya perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan meningkatnya tekanan ekonomi, kebijakan yang diterapkan di wilayah pesisir sering kali bertujuan untuk melindungi ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Fatmasari, 2016).

Di Lombok Barat, berbagai kebijakan terkait konservasi lingkungan, penangkapan ikan yang berkelanjutan, dan pengelolaan sumber daya alam telah diperkenalkan. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan-kebijakan ini sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada masyarakat pesisir (Achmad, 2022). Perubahan perilaku masyarakat, seperti beralih dari metode penangkapan ikan yang merusak lingkungan ke metode yang lebih ramah lingkungan, hanya dapat tercapai melalui pemahaman yang baik dan dukungan penuh dari masyarakat setempat. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengeksplorasi bagaimana komunikasi kebijakan dapat mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat pesisir di Lombok Barat (Sabarisman, 2017).

Komunikasi kebijakan merupakan komponen krusial dalam proses implementasi kebijakan publik, khususnya di lingkungan masyarakat yang beragam, seperti masyarakat pesisir (Situmeang, 2014). Kebijakan yang diterapkan tanpa strategi komunikasi yang efektif sering kali mengalami kendala dalam pelaksanaannya, terutama karena kurangnya pemahaman dan dukungan dari masyarakat yang menjadi sasaran. Di sinilah pentingnya komunikasi kebijakan yang tepat, yakni upaya untuk menjembatani niat baik pembuat kebijakan dengan perilaku dan sikap masyarakat yang diharapkan akan berubah sebagai dampak dari kebijakan tersebut (Setyarahajoe, 2013).

Masyarakat pesisir, yang hidup berdampingan langsung dengan sumber daya alam laut, menghadapi berbagai tantangan terkait perubahan lingkungan, ekonomi, dan sosial (Lomboan & Ruru, 2021). Banyak kebijakan yang diperkenalkan pemerintah di wilayah pesisir bertujuan untuk melindungi sumber daya laut, mengurangi degradasi lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Namun, tanpa adanya komunikasi yang efektif, kebijakan-kebijakan tersebut sering kali tidak mendapatkan dukungan penuh atau bahkan ditolak oleh masyarakat, terutama jika kebijakan itu dianggap mengganggu pola hidup atau kegiatan ekonomi mereka yang sudah berlangsung lama (Wahyudin, 2003).

Dalam konteks ini, perubahan perilaku masyarakat pesisir menjadi tujuan penting dari kebijakan yang diterapkan. Perubahan yang dimaksud bisa mencakup adaptasi terhadap praktik-praktik ramah lingkungan, seperti beralih dari metode penangkapan ikan yang merusak ekosistem ke teknik yang lebih berkelanjutan, atau perubahan dalam cara pengelolaan sumber daya alam yang mengutamakan kelestarian (Syaipudin, 2020). Agar perubahan tersebut dapat terjadi, masyarakat perlu memahami dengan baik manfaat kebijakan tersebut, baik bagi lingkungan maupun kesejahteraan mereka di masa mendatang. Di sinilah peran komunikasi kebijakan menjadi sangat penting (Arif, 2020).

Namun, tantangan utama dalam menyampaikan kebijakan kepada masyarakat pesisir adalah beragamnya tingkat pendidikan, akses terhadap informasi, serta adanya kearifan lokal yang telah mengakar kuat (Nurrohm & Anatan, 2009). Komunikasi kebijakan tidak bisa hanya mengandalkan metode satu arah atau formal, tetapi perlu melibatkan dialog partisipatif yang mengakomodasi kebutuhan, pandangan, dan pengalaman masyarakat setempat. Pendekatan yang inklusif ini akan membantu menciptakan rasa memiliki terhadap kebijakan, sehingga masyarakat lebih mudah menerima dan melaksanakan kebijakan tersebut (Mani & Guntoro & Prajarto, 2016).

Selain itu, masyarakat pesisir memiliki karakteristik sosial-budaya yang unik, yang mempengaruhi cara mereka menerima dan merespons kebijakan. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, akses terhadap informasi, dan keterikatan budaya dengan lingkungan laut berperan dalam proses adaptasi terhadap kebijakan baru. Oleh karena itu, pendekatan komunikasi yang digunakan harus mempertimbangkan kearifan lokal serta kemampuan masyarakat dalam menyerap informasi kebijakan (Lubis, 2014). Dengan pendekatan yang inklusif dan partisipatif, di mana masyarakat diajak untuk aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan, diharapkan dapat tercipta rasa memiliki terhadap kebijakan tersebut, yang pada gilirannya mendorong perubahan perilaku yang lebih positif dan berkelanjutan (Farida & Andalas, 2019).

Dalam studi kasus di Lombok Barat, salah satu tantangan utama adalah menjaga keseimbangan antara upaya pelestarian lingkungan pesisir dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kebijakan yang bersifat top-down sering kali menghadapi resistensi karena dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan atau realitas kehidupan masyarakat setempat. Oleh sebab itu, strategi komunikasi yang mampu menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat pesisir sangat diperlukan. Komunikasi yang bersifat dua arah, di mana pemerintah tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat, merupakan kunci untuk memastikan kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik.

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana proses komunikasi kebijakan mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat pesisir di Lombok Barat. Studi kasus digunakan untuk menganalisis fenomena dalam konteks yang nyata dan spesifik, yaitu penerapan kebijakan pemerintah yang berkaitan

dengan pengelolaan lingkungan pesisir dan dampaknya terhadap perilaku masyarakat setempat (Jessen, 2014).

Adapun lokasi penelitian tulisan ini dilakukan di wilayah pesisir Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Wilayah ini dipilih karena memiliki karakteristik geografis dan sosial-ekonomi yang relevan dengan tujuan penelitian, serta karena adanya penerapan berbagai kebijakan terkait pelestarian lingkungan pesisir, pengelolaan sumber daya laut, dan perikanan yang berkelanjutan.

Subjek penelitian terdiri dari dua kelompok utama, yakni—masyarakat pesisir Lombok Barat, yang meliputi para nelayan, petani tambak, serta warga yang berinteraksi langsung dengan ekosistem laut. Pihak pemerintah, yang terdiri dari pejabat pemerintahan lokal, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, serta lembaga terkait yang bertanggung jawab atas penerapan kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir.

Untuk mendapatkan data yang komprehensif, penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut: wawancara mendalam (*in-depth interview*), wawancara akan dilakukan dengan berbagai pihak terkait, seperti masyarakat pesisir, pejabat pemerintah, serta tokoh masyarakat. Pertanyaan wawancara akan difokuskan pada bagaimana kebijakan disampaikan, bagaimana masyarakat memahaminya, serta dampak dari kebijakan tersebut terhadap perilaku sehari-hari. Observasi partisipatif—peneliti akan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk melihat bagaimana interaksi antara masyarakat pesisir dengan lingkungan sekitar serta bagaimana perubahan perilaku terjadi setelah kebijakan diterapkan. Pengamatan ini juga akan digunakan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat dalam merespons kebijakan. Dokumentasi—data kebijakan dan dokumen resmi dari pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya pesisir akan dikumpulkan. Ini termasuk dokumen peraturan, laporan implementasi kebijakan, serta hasil-hasil sosialisasi kebijakan yang pernah dilakukan oleh pemerintah daerah. *Focus Group Discussion* (FGD)—diskusi kelompok terfokus akan dilakukan dengan masyarakat pesisir untuk mengumpulkan pandangan kolektif tentang kebijakan dan efeknya terhadap kehidupan mereka. FGD ini juga diharapkan dapat menggali perbedaan pendapat serta aspirasi masyarakat terkait kebijakan yang diterapkan (Fetters, 2013).

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Langkah-langkah analisis data meliputi: pengumpulan data. Data yang diperoleh dari berbagai sumber akan dikumpulkan dan dikategorikan berdasarkan tema-tema utama, seperti komunikasi kebijakan, penerimaan masyarakat, dan perubahan perilaku. Pengodean (*Coding*), data yang telah dikumpulkan akan diberi kode berdasarkan tema-tema tertentu yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Kode ini akan membantu dalam mengidentifikasi pola dan hubungan antar variabel. Penyajian data, yang mana data setelah dianalisis akan disusun dalam bentuk narasi untuk menggambarkan proses komunikasi kebijakan dan perubahan perilaku yang terjadi di masyarakat pesisir. Penarikan kesimpulan dan verifikasi—setelah data

disajikan, kesimpulan sementara akan ditarik. Proses ini akan dilanjutkan dengan verifikasi atau pemeriksaan ulang terhadap data untuk memastikan validitas temuan (Deng, 2013).

Pembahasan

Komunikasi Kebijakan Pemerintah dalam Mendorong Perubahan Perilaku Masyarakat Pesisir di Lombok Barat

Komunikasi kebijakan pemerintah berperan penting dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat, terutama di wilayah pesisir yang sangat bergantung pada sumber daya alam dan lingkungan sekitar (Muhawarman & Ayuningtyas, 2017). Di Lombok Barat, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya pesisir, seperti konservasi laut, pengelolaan perikanan, dan perlindungan ekosistem pesisir, ditujukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada masyarakat dan bagaimana masyarakat meresponsnya (Deisi, 2014).

Pemerintah daerah Lombok Barat, melalui dinas-dinas terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Lingkungan Hidup, seringkali menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam menyampaikan kebijakan kepada masyarakat pesisir (Agustina, 2018). Proses komunikasi kebijakan biasanya dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (a) Sosialisasi kebijakan--pemerintah melakukan sosialisasi kebijakan melalui berbagai saluran, seperti rapat desa, forum-forum resmi, penyuluhan lapangan, dan menggunakan media lokal seperti radio atau brosur. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan masyarakat pada kebijakan baru yang akan diterapkan serta alasan di balik kebijakan tersebut. (b) Partisipasi masyarakat--komunikasi kebijakan yang efektif seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat dalam perumusannya. Di Lombok Barat, kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan pesisir dan lingkungan sering kali melibatkan komunitas nelayan, tokoh adat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam diskusi kebijakan. Partisipasi ini penting untuk memastikan kebijakan yang dibuat relevan dengan kebutuhan dan kondisi lokal. (c) Penyuluhan dan edukasi--selain sosialisasi awal, pemerintah juga melakukan penyuluhan secara berkala kepada masyarakat, terutama mengenai teknik-teknik ramah lingkungan dalam menangkap ikan atau mengelola tambak. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan praktis kepada masyarakat tentang bagaimana mereka dapat menerapkan kebijakan tanpa harus merugikan sumber daya alam di sekitarnya (Alwafi, 2024).

Adapun komunikasi kebijakan di Lombok Barat dapat berhasil mendorong perubahan perilaku masyarakat pesisir karena menggunakan strategi komunikasi yang memperhatikan karakteristik lokal dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Beberapa strategi yang dapat diterapkan adalah: (a) Pendekatan partisipatif, yang terkait dengan kebijakan yang efektif sebaiknya melibatkan masyarakat dalam proses perumusan dan implementasinya (Rusmiarti, 2015). Pendekatan partisipatif dapat dilakukan dengan melibatkan komunitas dalam diskusi kebijakan,

mendengarkan masukan dari masyarakat pesisir mengenai kondisi lingkungan dan sosial-ekonomi mereka, serta memastikan kebijakan yang dibuat sesuai dengan realitas lokal. (b) Penggunaan bahasa dan media lokal, yang mana komunikasi kebijakan harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman masyarakat. Menggunakan bahasa lokal atau media yang akrab dengan masyarakat, seperti *platform* digital atau pertemuan langsung di desa, dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan yang disampaikan. (c) Pelibatan tokoh masyarakat dan pemimpin lokal, tokoh masyarakat, pemimpin adat, dan tokoh agama memiliki peran penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap kebijakan. Dengan melibatkan mereka sebagai agen perubahan, kebijakan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat pesisir. Tokoh-tokoh ini dapat berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan pesan kebijakan dengan cara yang lebih bisa diterima. (d) Penyuluhan berkelanjutan, hal ini sejalan dengan teknik-teknik ramah lingkungan dan praktik berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya pesisir harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya sekali atau dua kali. Edukasi ini perlu diperkuat dengan contoh-contoh nyata dan praktik langsung di lapangan, sehingga masyarakat bisa melihat manfaat dari penerapan kebijakan tersebut dalam jangka panjang (Maunah, 2016).

Efektivitas Komunikasi Kebijakan dalam Konteks Masyarakat Pesisir Lombok Barat

Efektivitas komunikasi kebijakan merupakan kunci penting dalam upaya pemerintah untuk mendorong perubahan perilaku di masyarakat pesisir Lombok Barat. Sebagai wilayah yang bergantung pada sumber daya alam laut, masyarakat pesisir menghadapi tantangan besar dalam menjaga kelestarian lingkungan sambil tetap memenuhi kebutuhan ekonomi mereka (Muhawarman et al., 2017). Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan pemerintah dalam bidang pengelolaan lingkungan dan sumber daya pesisir sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, ada beberapa faktor yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas komunikasi kebijakan, yaitu kejelasan pesan, keterlibatan masyarakat, kesesuaian dengan norma lokal, dan dampaknya terhadap perubahan perilaku (Kabu & Priadi, 2020).

Efektivitas komunikasi kebijakan dapat diukur dari sejauh mana pesan kebijakan disampaikan secara jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat pesisir. Di Lombok Barat, pemerintah daerah sering kali menggunakan metode sosialisasi formal melalui pertemuan desa, penyuluhan lapangan, dan media lokal seperti radio atau poster. Kejelasan pesan kebijakan ini menjadi penting karena masyarakat pesisir, terutama yang berpendidikan rendah, mungkin tidak memiliki akses atau pemahaman yang baik terhadap bahasa teknis yang digunakan dalam kebijakan pemerintah (Hendra & Rudianto, 2018).

Meski pemerintah telah berupaya menyampaikan kebijakan, sering kali terdapat kesenjangan pemahaman di kalangan masyarakat. Misalnya, kebijakan tentang pelarangan penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan mungkin tidak dipahami secara menyeluruh oleh nelayan yang

sudah terbiasa menggunakan metode tradisional. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, pesan kebijakan harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman masyarakat, misalnya melalui penggunaan bahasa lokal yang lebih sederhana dan visual yang dapat menjelaskan konsep-konsep teknis secara lebih gamblang (Kurniawan, 2017).

Keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas komunikasi kebijakan. Di Lombok Barat, masyarakat pesisir memiliki tradisi dan norma yang kuat, sehingga pelibatan mereka dalam proses komunikasi kebijakan dapat meningkatkan penerimaan dan komitmen terhadap perubahan perilaku. Komunikasi yang melibatkan masyarakat secara partisipatif lebih efektif dalam menciptakan pemahaman dan kesadaran bersama. Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah telah berusaha melibatkan tokoh masyarakat, seperti pemimpin adat, tokoh agama, dan pemimpin nelayan, sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat pesisir. Pelibatan ini terbukti meningkatkan efektivitas komunikasi karena tokoh-tokoh tersebut memiliki otoritas sosial yang dapat mempengaruhi pandangan dan sikap masyarakat. Namun, ketika keterlibatan ini tidak dilakukan secara konsisten atau pemerintah kurang mendengarkan aspirasi masyarakat, kebijakan yang disampaikan sering kali tidak diterima dengan baik, sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan tersebut (Abduh & Cangara, 2022).

Efektivitas komunikasi kebijakan juga bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut disesuaikan dengan kearifan lokal dan norma budaya masyarakat pesisir Lombok Barat. Masyarakat pesisir memiliki tradisi kuat terkait dengan pengelolaan sumber daya laut, yang sering kali berlawanan dengan kebijakan modern tentang perlindungan lingkungan. Misalnya, praktik menangkap ikan menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan sering kali dianggap sebagai bagian dari tradisi turun-temurun (Asriadi, 2020).

Agar komunikasi kebijakan efektif, pemerintah perlu mengintegrasikan kearifan lokal dalam penyampaian pesan. Salah satu contohnya adalah melalui penekanan pada nilai-nilai adat yang mendukung pelestarian lingkungan. Pemerintah dapat menggandeng tokoh adat untuk menyampaikan pesan kebijakan dengan pendekatan yang lebih menghargai norma-norma lokal, sehingga masyarakat pesisir dapat melihat kebijakan sebagai bagian dari upaya melestarikan tradisi mereka, bukan ancaman terhadap cara hidup mereka. Ketika kebijakan berhasil diintegrasikan dengan kearifan lokal, masyarakat akan lebih mudah menerima perubahan perilaku yang diinginkan oleh pemerintah (Hardiyanto & Pulungan, 2019).

Indikator utama efektivitas komunikasi kebijakan adalah sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mendorong perubahan perilaku yang sesuai dengan tujuan kebijakan. Di Lombok Barat, salah satu fokus utama kebijakan pemerintah adalah mengurangi praktik-praktik yang merusak lingkungan, seperti penggunaan alat tangkap ikan yang destruktif atau eksploitasi sumber daya pesisir secara berlebihan. Komunikasi kebijakan yang efektif harus mampu mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat

pesisir sehingga mereka mengadopsi praktik yang lebih ramah lingkungan (Nasukah & Sulistyorini, & Winarti, 2020).

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, perubahan perilaku masyarakat pesisir Lombok Barat terhadap kebijakan lingkungan bervariasi. Beberapa kelompok masyarakat yang mendapatkan edukasi intensif melalui penyuluhan dan pelatihan telah mulai mengubah cara mereka menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan. Namun, perubahan perilaku ini cenderung terbatas pada komunitas yang memiliki akses langsung ke program-program pemerintah atau yang dipimpin oleh tokoh masyarakat yang mendukung kebijakan.

Di sisi lain, sebagian besar masyarakat pesisir masih enggan mengubah praktik tradisional mereka karena merasa kebijakan tersebut membatasi kebebasan mereka dalam memanfaatkan sumber daya laut. Ketidakefektifan komunikasi dalam beberapa kasus dapat disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah untuk menyampaikan manfaat jangka panjang dari kebijakan tersebut, serta kurangnya alternatif yang dapat menggantikan praktik tradisional yang lebih merusak.

Respon Masyarakat Pesisir Lombok Barat Terhadap Kebijakan yang Diterapkan

Respon masyarakat pesisir Lombok Barat terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas komunikasi kebijakan dan dampaknya terhadap perilaku masyarakat. Dalam konteks masyarakat yang memiliki tradisi dan budaya kuat, respon ini dapat bervariasi, mencerminkan tingkat pemahaman, penerimaan, serta pengaruh dari kebijakan tersebut terhadap kehidupan sehari-hari mereka. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam membahas respon masyarakat pesisir terhadap kebijakan yang diterapkan (Limantara & Krisnawati & Winardi, 2017).

Pemahaman masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan sangat menentukan sikap dan respon mereka. Di Lombok Barat, kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya pesisir sering kali melibatkan aspek teknis dan ilmiah yang mungkin sulit dipahami oleh sebagian besar masyarakat, terutama yang berpendidikan rendah. Masyarakat yang tidak memahami tujuan dan manfaat dari kebijakan tersebut cenderung memberikan respon negatif atau skeptis (Harefa & Idham, & Erniyanti, 2023).

Penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah sering kali tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Dalam beberapa kasus, masyarakat yang tidak terlibat dalam proses sosialisasi merasa terasing dari kebijakan yang diterapkan. Misalnya, nelayan yang tidak mendapatkan informasi tentang larangan penggunaan alat tangkap tertentu mungkin merasa terancam dan cenderung menolak kebijakan tersebut, karena mereka tidak menyadari bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk melindungi ekosistem laut yang mereka andalkan (Nurhaeni & Habsari, 2011).

Kebijakan yang diterapkan pemerintah sering kali memiliki dampak langsung terhadap kehidupan ekonomi masyarakat pesisir. Respon masyarakat terhadap kebijakan ini dapat bervariasi tergantung pada bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi mata pencaharian mereka. Misalnya, kebijakan yang membatasi alat tangkap tertentu untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dapat memicu protes dari nelayan yang bergantung pada metode penangkapan tersebut. Namun, pemerintah dapat menunjukkan manfaat jangka panjang dari kebijakan tersebut—seperti peningkatan hasil tangkapan ikan dalam jangka waktu yang lebih lama—masyarakat mungkin akan lebih bersedia menerima dan beradaptasi dengan kebijakan tersebut. Dalam hal ini, keberhasilan komunikasi yang efektif sangat penting untuk menjelaskan dampak positif yang diharapkan dari kebijakan, serta menyediakan alternatif yang dapat membantu masyarakat beralih ke praktik yang lebih berkelanjutan (Taali & Darmawan, & Maduwinarti, 2024).

Respon masyarakat terhadap kebijakan juga terlihat dari sejauh mana mereka beradaptasi dengan perubahan yang diharapkan. Di Lombok Barat, meskipun ada resistensi awal terhadap kebijakan yang diterapkan, beberapa komunitas telah mulai menunjukkan perubahan perilaku dalam mengelola sumber daya pesisir. Misalnya, kelompok nelayan yang sebelumnya menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan mulai beralih ke metode yang lebih ramah lingkungan setelah mendapatkan edukasi dan penyuluhan yang memadai.

Adaptasi ini dapat dilihat sebagai respon positif terhadap kebijakan, meskipun proses perubahan tersebut tidak selalu berjalan mulus. Beberapa masyarakat mungkin tetap mempertahankan praktik lama mereka karena merasa lebih nyaman dengan cara-cara yang sudah dikenal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus memberikan dukungan dan informasi yang diperlukan agar masyarakat dapat beradaptasi dengan baik terhadap kebijakan yang diterapkan (Haryati & Ferriswara, 2020).

Tokoh masyarakat, seperti pemimpin adat dan tokoh agama, memiliki pengaruh besar dalam membentuk respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Ketika tokoh-tokoh ini mendukung kebijakan yang diterapkan, masyarakat cenderung lebih terbuka dan mau berpartisipasi. Sebaliknya, jika tokoh masyarakat tidak mendukung kebijakan tersebut atau menganggapnya merugikan, respon masyarakat bisa menjadi negatif.

Di Lombok Barat, beberapa kebijakan berhasil diterima dengan baik berkat dukungan dari tokoh masyarakat yang dianggap memiliki legitimasi. Mereka berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, menjelaskan kebijakan, dan membantu masyarakat memahami pentingnya pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Ketika tokoh masyarakat terlibat dalam sosialisasi kebijakan, mereka dapat memberikan contoh nyata dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam perubahan yang diharapkan.

Meskipun ada respon positif dari sebagian masyarakat, masih terdapat resistensi dan tantangan yang harus dihadapi. Banyak nelayan yang merasa bahwa kebijakan yang diterapkan justru mengancam mata pencaharian mereka. Terutama ketika kebijakan dianggap tidak

mempertimbangkan kondisi lokal atau kurang memberikan solusi alternatif. Ketidakhahaman tentang tujuan kebijakan juga dapat menyebabkan penolakan. Selain itu, ketika kebijakan diterapkan tanpa melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, hal ini dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan. Banyak masyarakat pesisir yang merasa bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah tidak mewakili kepentingan mereka. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mendengarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat sebelum menerapkan kebijakan baru.

Kesimpulan

Komunikasi kebijakan yang efektif memiliki peranan krusial dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat pesisir di Lombok Barat. Keberhasilan komunikasi kebijakan sangat bergantung pada beberapa faktor, termasuk kejelasan penyampaian pesan, keterlibatan masyarakat, dan keselarasan kebijakan dengan norma serta kearifan lokal. Kejelasan pesan yang disampaikan pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami tujuan dan manfaat dari kebijakan yang diterapkan. Kurangnya pemahaman sering kali mengakibatkan resistensi terhadap kebijakan, yang dapat menghambat perubahan perilaku yang diinginkan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menggunakan bahasa yang sederhana dan metode komunikasi yang sesuai dengan konteks lokal agar informasi dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan terbukti meningkatkan penerimaan dan komitmen mereka. Ketika masyarakat merasa dilibatkan, mereka cenderung memiliki rasa kepemilikan terhadap kebijakan tersebut dan lebih bersedia untuk beradaptasi. Oleh karena itu, kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan pemimpin lokal menjadi sangat penting dalam membangun kepercayaan dan legitimasi kebijakan. Respon masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan menunjukkan bahwa ada kecenderungan perubahan perilaku positif, terutama di kalangan kelompok yang mendapatkan edukasi dan informasi yang memadai. Namun, resistensi masih ada, terutama dari masyarakat yang merasa bahwa kebijakan mengancam mata pencaharian mereka. Ini menekankan perlunya pemerintah untuk menyediakan solusi alternatif dan dukungan yang cukup agar masyarakat dapat bertransisi ke praktik yang lebih berkelanjutan tanpa kehilangan sumber pendapatan mereka. Dalam mencapai tujuan pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan, komunikasi kebijakan harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan, pemahaman, dan kearifan lokal masyarakat. Pemerintah perlu terus berupaya menjalin dialog dengan masyarakat pesisir, mengedukasi mereka tentang manfaat kebijakan, serta memberikan dukungan praktis yang diperlukan. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif, diharapkan perubahan perilaku yang diinginkan dapat tercapai, dan keberlanjutan sumber daya pesisir di Lombok Barat dapat terjaga.

DAFTAR RUJUKAN

- Abduh, I. M., & Cangara, H. (2022). Kritik Sosial Kebijakan Pemerintah dalam Platform Media Sosial dengan Pendekatan Komunikasi Hyperpersonal. scholar.archive.org. Retrieved from <https://scholar.archive.org/work/uo67wnhyc5bdxlqkifu5oh76si/access/wayback/https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/n/article/download/7085/pdf>
- Achmad, W. (2022). Dimensi sosial dalam pengembangan masyarakat di wilayah pesisir. download.garuda.kemdikbud.go.id. Retrieved from <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3035232\&val=20674\&title=Dimensi%20Sosial%20dalam%20Pengembangan%20Masyarakat%20di%20Wilayah%20Pesisir>
- Agustina, T. (2018). Analisis Wacana Gerakan Sosial Dalam Menentukan Opini Publik Via Twitter (Studi Pada Hashtag# Bijakbersosmed Periode 1 Sampai 5 eprints.radenfatah.ac.id. Retrieved from <http://eprints.radenfatah.ac.id/3456/>
- Alwafi, A. M. (2024). Strategi Kebijakan Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Dalam Menerapkan Konten Lokal Pada Siaran Tv Lokal. repository.uin-suska.ac.id. Retrieved from <http://repository.uin-suska.ac.id/77641/>
- Arif, L. (2020). Efektivitas kebijakan menghadapi era new normal dalam masa pandemi covid-19: Tinjauan dalam perspektif masyarakat. repository.upnjatim.ac.id. Retrieved from http://repository.upnjatim.ac.id/12556/1/4.Bookcoper%20Full_paper_Potret_Masyarakat LENGKAP.pdf#page=63
- Asriadi, A. (2020). Komunikasi Efektif Dalam Organisasi. RETORIKA: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Penyiaran Retrieved from <https://journal.uiad.ac.id/index.php/retorika/article/view/358>
- Deisi, R. (2014). Implementasi Kebijakan Dalam Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Palu. eprints.stialanmakassar.ac.id. Retrieved from <https://eprints.stialanmakassar.ac.id/id/eprint/1151/>
- Deng, L. (2013). Deep learning: Methods and applications. <https://doi.org/10.1561/20000000039>
- Farida, N., & Andalas, E. F. (2019). Representasi kesenjangan sosial-ekonomi masyarakat pesisir dengan perkotaan dalam novel gadis pantai karya Pramodya Ananta Toer. KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa Retrieved from <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/kembara/article/view/7447>
- Fatmasari, D. (2016). Analisis Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah. Retrieved from <https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/amwal/article/view/255>

- Fetters, M. (2013). Achieving integration in mixed methods designs—Principles and practices. <https://doi.org/10.1111/1475-6773.12117>
- Hardiyanto, S., & Pulungan, D. (2019). Komunikasi Efektif Sebagai Upaya Penanggulangan Bencana Alam di Kota Padangsidimpuan. ... Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi. Retrieved from <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/interaksi/article/view/2694>
- Harefa, P. G., Idham, I., & Erniyanti, E. (2023). Analisis Teori Hukum terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Uang: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Retrieved from <http://penerbitgoodwood.com/index.php/JIHHAM/article/view/1923>
- Haryati, E., & Ferriswara, D. (2020). Kebijakan Responsif Sebagai Instrumen Transformasi Pelayanan Publik Pada Masa Pandemi Covid-19. Prosiding Seminar Nasional Penelitian Retrieved from <http://www.jurnal.saburai.id/index.php/PSN/article/view/831>
- HENDRA, Y., Rudianto, R., & ... (2018). Analisis Model Komunikasi Efektif Dalam Komunikasi Mitigasi Bencana. Kumpulan Penelitian Retrieved from <http://publikasiilmiah.umsu.ac.id/index.php/publikasi-ilmiah/article/view/25>
- Jessen, F. (2014). A conceptual framework for research on subjective cognitive decline in preclinical Alzheimer's disease. <https://doi.org/10.1016/j.jalz.2014.01.001>
- Kabu, S. R., & Priadi, R. (2020). Kompetensi Komunikasi Pimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Di Kementerian Agama Kabupaten Nias Utara.
- Kurniawan, B. (2017). Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Sekretariat Daerah Kota Tangerang. Jurnal Mozaik. Retrieved from <https://ijc.ilearning.co/index.php/mozaik/article/view/774>
- Limantara, A. D., Krisnawati, L. D., Winardi, S., & ... (2017). Solusi Pengawasan Kebijakan Mengatasi Kemacetan Jalan dan Parkir Kota Berbasis Internet Cerdas. file-filkom.ub.ac.id. Retrieved from http://file-filkom.ub.ac.id/fileupload/assets/upload/file/PTIHK/jurnal/2017030046/2018-06/IN/DR00001201806_FIN.pdf
- Lomboan, D. V. Y., RURU, J., & ... (2021). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Desa Kumu Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. Jurnal Administrasi Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/35344>

- Lubis, Y. A. (2014). Studi Tentang Aktivitas Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai Pelabuhan. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Retrieved from <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/918>
- Lusnita, N. (2019). Analisis Pelaksanaan Strategi Komunikasi Program Pengurangan Sampah Plastik Melalui Kebijakan Kantong Plastik Berbayar di Ritel Modern. Journal of Servite. Retrieved from <http://journal.lspr.edu/index.php/servite/article/view/84>
- Mani, L., Guntoro, B., & Prajarto, N. (2016). Eksistensi Public Relation Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Komunikasi Dan Negosiasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima. Jurnal Ekonomi. Retrieved from <http://www.ecojoin.org/index.php/EJE/article/view/22>
- Maunah, B. (2016). Dampak Regulasi di Bidang Tik terhadap Perubahan Perilaku Sosial Siswa di Sekolah. Jurnal Cakrawala Pendidikan. Retrieved from <https://journal.uny.ac.id/index.php/cp/article/view/8953>
- Muhawarman, A., Ayuningtyas, D., & ... (2017). Formulasi Kebijakan Komunikasi untuk Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan. Media Kesehatan Retrieved from <https://www.neliti.com/publications/212645/formulasi-kebijakan-komunikasi-untuk-pelaksanaan-program-pembangunan-kesehatan>
- Nasukah, B., Sulistyorini, S., & Winarti, E. (2020). Peran Komunikasi Efektif Pemimpin Dalam Meningkatkan Kinerja Institusi. core.ac.uk. Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/322565490.pdf>
- Ngangi, C. R. (2011). Konstruksi sosial dalam realitas sosial. Agri-Sosioekonomi. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jisep/article/view/85>
- Nurhaeni, I. D. A., Habsari, S. K., & ... (2011). Efektivitas implementasi kebijakan anggaran responsif gender. JIANA (Jurnal Ilmu Retrieved from <https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/1073>
- Nurrohim, H., & Anatan, L. (2009). Efektivitas komunikasi dalam organisasi. Jurnal Manajemen Maranatha. Retrieved from <https://journal.maranatha.edu/index.php/jmm/article/view/188>
- Romdani, L. (2021). Teori Konstruksi Sosial: Sebuah Teori Bagaimana Warga Negara memaknai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemic. download.garuda.kemdikbud.go.id. Retrieved from <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2295500\&val=7753\&title=TEORI%20KONSTRUKSI%20SOSIAL%20SEBUAH%20TEORI%20BAGAIMANA%20WARGA%20NEGARA%20MEMAKNAI%20PELAKSANAAN%20PEMILIHAN%20KEPALA%20DAERAH%20DI%20MASA%20PANDEMIC>

- Rusmiarti, D. A. (2015). Analisis difusi inovasi dan pengembangan budaya kerja pada organisasi birokrasi. Masyarakat Telematika Dan Informasi. Retrieved from <https://www.neliti.com/publications/233782/analisis-difusi-inovasi-dan-pengembangan-budaya-kerja-pada-organisasi-birokrasi>
- Sabarisman, M. (2017). Identifikasi dan pemberdayaan masyarakat miskin pesisir. Sosio Informa. Retrieved from <https://ejournal.poltekesos.ac.id/index.php/Sosioinforma/article/view/707>
- Setyarahajoe, R. (2013). Bentuk Komunikasi Politik untuk Membangun Perilaku Politik Masyarakat Lokal Guna Menciptakan Pemilukada yang Aman. ... (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik). Retrieved from <https://jkmp.umsida.ac.id/index.php/jkmp/article/view/1583>
- Situmeang, I. V. O. (2014). Beragam Isu Menyangkut Kebijakan Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi. Retrieved from <https://komunikologi.esaunggul.ac.id/index.php/KM/article/view/145>
- Syaipudin, L. (2020). Efektifitas Media Komunikasi di Tengah Pandemi: Respon Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung. Kalijaga Journal of Communication. Retrieved from <https://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/kjc/article/view/1700>
- Taali, M., Darmawan, A., & Maduwintarti, A. (2024). Teori dan Model Evaluasi Kebijakan: Kajian kebijakan kurikulum pendidikan. books.google.com. Retrieved from https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=eHL8EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=teori+kebijakan+responsif&ots=a0yP_K5k9F&sig=t2wzzLUg-VyWLkEKT3hNcpHcGh8
- Wahyudin, Y. (2003). Sistem sosial ekonomi dan budaya masyarakat pesisir. academia.edu. Retrieved from <https://www.academia.edu/download/39118127/20031205-sistem-sosial-ekonomi-dan-budaya-masyarakat-pesisir.pdf>